

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* , Konstitusi Press, Jakarta
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, 2004, FH UII Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2017, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Fauzan, Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*, Kencana, Depok.
- M. Rakhmat, 2023, “*Pembuktian di Mahkamah Konstitusi* ,” Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- _____, 2008, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta
- Mohammad Saihu, Et.Al., 2015, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram.
- Mustakim La Dee, 2024, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Nur Solikin, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Rully Nasrullah, 2017, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Prenada Media, Jakarta

Saldi Isra, Et.Al., 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

C. Jurnal

Absalon Kartabrata, 2020, “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),” *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 1, No. 3

Agus Purnomo, 2016, “Antara Kebenaran Substantif Dan Kebenaran Prosedural Dalam Penyusunan Perda Syariat,” *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 15, no. 2.

Agusniwan Etra, 2022, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 19 No. 2

- Ahmad Fadlil Sumadi, 2016, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*," Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 6.
- Andi Armayudi Syam dan Andi Ahmad Malikul Afdal, 2025, "Political Budget Cycle in Local Elections in Indonesia: A Systematic Review", *Journal of Contemporary Local Politics*, Vol. 4, No. 1
- Andi Yusuf Akbar, Fatma Hidayah, Udyahitani Secundaputeri, 2023, "Kampanye dan Perilaku Memilih di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019 Dapil Jawa Timur 11 dan Sulawesi Selatan 7," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 9
- Antonius Saragintan, Syahrul Hidayat, 2016, "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011," *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1
- Bisariyadi, 2020, "Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi ", Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 4.
- Bivitri Susanti, 2015, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4
- Briyan Efflin Syahputra, 2020, "Pendeteksian Fraud: Peran Big Data dan Audit Forensik," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol. 12, No. 2
- Christine S.T Kansil, *Et.Al*, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 2
- Dian Fitria, 2020, "Kelemahan PKPU dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ," *Jurnal Keadilan dan Demokrasi*, Vol. 6, No. 1
- Dian Hafizah *Et.Al.*, 2019, "Analisis Dampak Kebijakan Beras Sejahtera dan Kebijakan Program Bantuan Non Tunai terhadap Titik Ekuilibrium Rumah Tangga Miskin di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 3, No. 4
- Dina Fadiyah, Umami Zakiah, 2018, "Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10, No. 2
- Dyah Ajeng Ika Pusparini, *Et.Al.*, 2022, "Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU Di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan Dan Solusi", *Journal KPU*, Vol. 3 No. 2

- Eka Rastiyanto Amrullah, *Et.Al*, 2020, “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Indonesia”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 38 No. 2
- Fajar Rahmanto, Muchammad Iqbal Firmansyah, Titin Purwaningsih, 2021, “Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas,” *Wacana Politik: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2
- Farah Sabilla Febriany, Dinie Anggraeni Dewi, 2021, “Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 4
- Firdaus Arifin, 2024, “Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah,” *RIO Law Jurnal*, Vol. 6, No. 1
- Hananto Widodo dan Dicky Eko Prasetyo, 2021, “Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu,” *Perspektif Hukum*, Vol. 21, No. 2
- Hartati & Firmansyah Putra, 2019, “Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika),” *JISIP UNJA*, Vol. 3, No. 1
- Hasrul Hanif, 2016 “Politik Klientelisme Baru dan Dilema Demokratisasi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, Vol. 16, No. 3
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya, 2022, “Penerapan Ajaran Pembuktian Bebas yang Terbatas dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi ,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 5.
- Irene Angelita Rugian, 2021, “Proportional Principles in the Constitutional Court Decision (Comparative Study in Indonesia and Germany),” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2
- Juwita, 2023, “Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 15, No. 3
- Ketut Suardana, 2022, “Batas Tanggung Jawab KPU dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ,” *Jurnal Administrasi Pemilu*, Vol. 5, No. 1
- Khotob Tobi Almalibari, *Et.Al*, 2021, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemilihan Umum,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3 No. 1

- Maulida Handayani dan M. Gaussyah, 2023, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Analisis Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 8, No. 3
- Muchammad Iqbal Firmansyah, Fajar Rahmanto, dan Titin Purwaningsih, 2021, "Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 6, No. 1
- Muhammad Bahrul Ulum, 2014 "Evaluasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Lentera Hukum* Vol. 1 No. 2
- Nopesius Bawembang, 2019, "Beban Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ", *Lex Administratum*, Vol. VII, No. 4.
- Nurul Huda, 2023, "Problematika Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 4, No. 1
- Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, dan Nicolaos Manalu, 2025 "Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Syntax Admiration* Vol. 6 No. 1
- R. Azhar & M. Fadhil, 2022, "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu: Analisis Teoritis dan Praktis," *Jurnal Konstitusi Indonesia*, Vol. 19, No. 1
- Rahayu Prasetyaningsih, 2011, "Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Keadilan Substantif", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, No. 1
- Rantian Wigita, Erinda Alfiani Fauzi, & Murniyati Yanur, 2025, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIREKAP dalam Meminimalisir Kecurangan Pemilu pada Pemilu 2024 di Kota Tangerang," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 9, No. 1
- Refly Harun, 2016, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1
- Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, 2023, "Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2

Rommy Patra, 2022, “Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2

Siti Nurjanah, 2021, “Judicial Activism dan Keadilan Substansial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 7, No. 2

Valentina Mariama Sadeadema, 2017, “Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum,” *Jurnal Transparansi dan Rekam Jejak*, Vol. 3. No. 2

Wahyu Trisno Aji, Mig Irianto Legowo, 2024, “Pancasila sebagai Sistem Etika Politik dan Etika Pemerintahan di Indonesia,” *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 4

yamsuddin Haris, 2014, “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 1

D. Internet

Fachri Audhia Hafiez, “Faisal Basri Singgung Politik Gentong Babi di Sidang MK, Apa Maksudnya?”, <https://www.medcom.id/>, di kunjungi pada tanggal 02 September 2025 jam 22.08

H.S Brahmana, “Teori dan hukum pembuktian”, <https://www.pn-lhoksukon.go.id//> di kunjungi pada tanggal 23 maret 2025 jam 00.08

H.S Brahmana, “Teori dan hukum pembuktian”, <https://www.pn-lhoksukon.go.id//>, di kunjungi pada tanggal 25 Agustus 2025 jam 00.08

IndoForensics, “Analisa Kejanggalan Hasil SIREKAP Pemilu 2024”, <https://indoforensics.wordpress.com/>, di kunjungi pada tanggal 03 September 2025 jam 00.29

Komisi Pemilu, “Pemilu Tahun 2004”, www.kpu.go.id, dikunjungi pada tanggal 17 agustus 2025 jam 22.17

Komisi Pemilu, “Pemilu Tahun 2009”, www.kpu.go.id, dikunjungi pada tanggal 17 agustus 2025 jam 22.54

Komisi Pemilu, “Pemilu Tahun 2014”, www.kpu.go.id, dikunjungi pada tanggal 23 agustus 2025 jam 14.36

Komisi Pemilu, “Pemilu Tahun 2019”, www.kpu.go.id, dikunjungi pada tanggal 23 agustus 2025 jam 17.16

Komisi Pemilu, “Pemilu Tahun 2024”, www.kpu.go.id, dikunjungi pada tanggal 23 agustus 2025 jam 20.58

Puspen Kemendagri, “Kemendagri Tegaskan DPT adalah Kewenangan KPU”, <https://disdukcapil.bontangkota.go.id/> , dikunjungi pada tanggal 31 agustus 2025 jam 19.31

Putra Nasution, “*Djohermansyah Djohan Sebut Pemilu 2024 Tak Jurdil karena Intervensi Jokowi,*” <https://www.kompas.tv/>, di kunjungi pada tanggal 02 September 2025 jam 23.26

Redaksi Alinea.id, “*Guru Besar IPDN Minta MK Anulir Hasil Pilpres 2024,*” <https://www.alinea.id/>, di kunjungi pada tanggal 02 September 2025 jam 23.29

Tim News, “*Faisal Basri Sebut Bansos Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo dan Gibran,*” <https://www.Liputan6.com/>, di kunjungi pada tanggal 02 September 2025 jam 23.20

E. Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU-B-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

